

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi telah banyak digunakan masyarakat dalam berbagai kehidupan, baik dalam praktek sederhana pada kehidupan sehari-hari maupun dengan mengikuti aturan yang jelas sesuai standar akuntansi keuangan (SAK) pada perusahaan. Bagi perusahaan, informasi yang dihasilkan akuntansi digunakan manajemen sebagai dasar dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Berbagai penelitian pada perusahaan kecil dan menengah menyimpulkan bahwa penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan akan mempengaruhi prestasi perusahaan (Suhairi, 2004).

Manajer mempertanggungjawabkan wewenang yang telah dilimpahkan, maka secara berkala harus membuat laporan yang menunjukkan seberapa baik wewenang yang diterima dari *stake holder* tersebut telah dilaksanakan. Salah satu informasi yang digunakan sebagai alat komunikasi antara *stake holder* dengan manajer, maupun diantara manajer pada suatu organisasi adalah informasi akuntansi, seperti laporan keuangan dan laporan intern lainnya. Akuntansi seringkali juga disebut sebagai bahasa bisnis (Belkaoui, 2000), karena merupakan media yang digunakan untuk mengkomunikasikan berbagai informasi akuntansi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Indonesia oleh Suhairi (2001) dan Benjamin (1990), serta peneliti lain yang dilakukan di beberapa negara, diduga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penerapan

akuntansi pada perusahaan kecil dan menengah. Salah satu penyebabnya adalah keharusan untuk menggunakan SAK yang sama dengan perusahaan besar dalam penyusunan laporan keuangan.

Praktek akuntansi, khususnya penyusunan laporan keuangan usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia memiliki banyak kelemahan. Antara lain disebabkan oleh faktor lokasi dan ukuran perusahaan, rendahnya pendidikan *owner manager* atau manajer pemilik, kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap penyusunan pelaporan yang sesuai dengan standar dari manajer pemilik dan kemungkinan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UKM (Muntoro, 2000).

Pemahaman akan laporan keuangan yang sesuai SAK UKM dapat ditingkatkan apabila laporan keuangan disajikan dalam format yang seragam dan menggunakan deskripsi yang sama untuk pos-pos sejenis sehingga nantinya dapat digunakan sebagai pembanding untuk melihat kondisi masing-masing perusahaan. Namun dalam kenyataannya sulit diterapkan dan menghalangi perusahaan dalam memberikan informasi pada pengguna laporan keuangan.

Sejak tahun 1983, pemerintah secara konsisten telah melakukan berbagai upaya deregulasi sebagai upaya penyesuaian struktural dan restrukturisasi perekonomian. Kendati demikian, banyak yang mensinyalir deregulasi di bidang perdagangan dan investasi tidak memberi banyak keuntungan bagi UKM, bahkan justru perusahaan besar dan konglomeratlah yang mendapat keuntungan. Studi empiris membuktikan bahwa penambahan nilai tambah ternyata tidak dinikmati oleh UKM, namun justru perusahaan skala konglomerat dengan tenaga kerja lebih

dari 1000 orang yang menikmati kenaikan nilai tambah secara absolut maupun per rata-rata perusahaan (Kuncoro & Abimanyu, 2005).

Karakteristik UKM yang memiliki heterogenitas tinggi dalam berbagai aspek bisnis, mengimplikasikan bahwa generalisasi kebijakan terhadap UKM akan sulit mewujudkan tujuan pengembangan yang diharapkan (Yoseva, 2006). Disisi lain kebijakan dengan pendekatan individual sulit dilakukan, karena berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi. Untuk itu, pada tahap awal pengembangan UKM ditempuh melalui pendekatan sentra bisnis.

Mengenai pengembangan UKM dan pendekatan sentra bisnis, pemerintah membantu menumbuhkan iklim UKM melalui penetapan peraturan perundang-undangan yang tertuang di dalam UU no. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil. Pasal 4 pada UU no. 9 tahun 1995 tertulis “pemberdayaan usaha kecil bertujuan meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha meningkatkan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional”.

Kebijakan-kebijakan lain pemerintah pada pasal 6 UU no. 9 tahun 1995, sangat membantu UKM dalam hal pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan usaha dan perlindungan. Kebutuhan UKM sekarang tidak hanya membutuhkan pendanaan atau permodalan, tetapi juga memerlukan keterampilan menata keuangan, lebih tepatnya membuat laporan keuangan (Ditta, 2008). Sudah banyak penelitian yang membuktikan, bahwa UKM belum dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK keluaran Ikatan Akuntan

Indonesia (IAI), karena sangatlah memberatkan bagi UKM (Williams, Chen & Tearney, 1989; Knutson & Hendry, 1985; Nair & Rittenberg, 1983; Wishon, 1985, dalam Wahdini dan Suhairi, 2006).

Dengan permasalahan tersebut, mendorong *The International Accounting Standards Board* untuk menyusun SAK yang khusus UKM (*Small and Medium Enterprise*) (Jesus, Susan dan Yolanda, 2008). Selain itu, IAI telah menyusun *Exposure Draft* SAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), untuk digunakan oleh entitas kecil dan menengah agar memiliki akuntabilitas publik yang signifikan.

Tujuan laporan keuangan bagi UKM yang tercantum di dalam rancangan SAK UKM adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

Permasalahan yang dihadapi UKM terkait dengan belum memiliki laporan keuangan sesuai dengan SAK UKM, yaitu mengalami kesulitan untuk mengakses sumber-sumber permodalan atas lembaga keuangan terutama dari sektor perbankan. Dampaknya, UKM belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kredit bank yang biasanya diukur dengan 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*) (Jannes, 2005).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan membahas permasalahan tersebut dengan judul **“PENERAPAN RANCANGAN STANDARD AKUNTANSI KEUANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (SAK UKM) OLEH UKM DI DUSUN KASONGAN”**.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Wahdini dan Suhairi (2006), yang berjudul **“PERSEPSI AKUNTAN TERHADAP OVERLOAD STANDARD AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH”**. Perbedaan penelitian ini terletak pada 1). Sampel penelitian dilakukan terhadap UKM di Bantul, yang sebelumnya dilakukan terhadap akuntan perbankan yang bekerja di Padang; 2). Lokasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kasongan, kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menentukan UKM untuk menerapkan SAK UKM di dalam laporan keuangan?
2. Seberapa besar manfaat laporan keuangan bagi UKM, ketika sudah menerapkan SAK UKM di dalam laporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor-faktor penentu UKM untuk menerapkan SAK UKM di dalam laporan keuangan.
2. Dapat memberikan fakta mengenai manfaat laporan keuangan bagi UKM, ketika sudah menerapkan SAK UKM di dalam laporan keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai bahan pertimbangan bagi UKM di Kasongan, untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam penyusunan laporan keuangan.